

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata saat ini memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara karena dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, serta dapat dijadikan sebagai media integrasi yang menyatukan sosial dan budaya. Saat ini, industri pariwisata Korea Selatan merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan negara Korea Selatan (Chi Ok Oh, 2003). Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan bekerjasama dengan pihak swasta serta aktor-aktor non pemerintah untuk mendukung dalam melakukan diplomasi publik dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Korea Selatan ke seluruh dunia, (Jan Malissen, dan Yul Sohn, 2016) termasuk Indonesia.

*Korean Wave* merupakan suatu fenomena peningkatan popularitas budaya dan hiburan Korea Selatan di Asia dan berbagai negara didunia (Jin, 2012). Dengan perkembangan teknologi dan mulai bermunculan media sosial, *Korean Wave* terus mendapat perhatian dari negara-negara diluar Asia hingga akhirnya menjadi perhatian global. Dalam hal peningkatan popularitas budaya, Korea Selatan mengandalkan drama dan film sebagai alat utama memperkenalkan dan mempromosikan budayanya. Produksi drama dan film banyak mengandung unsur budaya dengan memasukan berbagai ciri khas seperti berbagai makanan khas, tempat-tempat wisata, pakaian tradisional, juga bahasa yang digunakan dalam drama dan film menjadikan bahasa Korea

dikenal dan banyak dipelajari oleh masyarakat luar Korea Selatan. Dalam suatu studi yang dilakukan oleh Jeong Min Ko berjudul “*A Study on Competitiveness of ‘Korean Wave’ Contents*” menyebutkan bahwa kunci dari daya saing film dan drama buatan Korea Selatan adalah jalan cerita yang baik, kehadiran aktor dan aktris pemeran yang kuat memberi warna pada cerita, latar belakang yang diangkat memiliki keunikan tersendiri dengan tema yang menarik (Parc & Moon, 2013).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, diplomasi telah menjadi salah satu instrument utama yang digunakan oleh suatu negara untuk meningkatkan hubungan dengan negara lain dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam hubungan internasional, pada umumnya diplomasi merupakan tahap awal yang dilakukan apabila suatu negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi hubungan yang semakin erat. Salah satu bentuk diplomasi yang saat ini sering digunakan oleh beberapa negara di dunia adalah diplomasi budaya.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun. Hubungan dan kerja sama bilateral memasuki babak baru pada kunjungan kenegaraan Presiden Moon Jae-in ke Indonesia tanggal 8-10 November 2017. Melalui “*Republic of Korea-Republic of Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace*” kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi *special strategic partnership*, dengan fokus kerja sama pada empat area, yaitu: pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan

infrastruktur, *people-to-people exchanges*, dan kerja sama regional dan global (Kemenlu, n.d.). Indonesia dan Korea Selatan memiliki visi yang sama, nilai dan kemauan untuk berkontribusi dalam penguatan di berbagai bidang. Mereka pun mengemasnya dalam sebuah kerja sama dalam bentuk kegiatan stimulasi, evaluasi dan rekomendasi kebijakan dari studi-studi tentang sosial ekonomi, kependudukan dan budaya (Kemenlu, n.d.).

Salah satu bidang yang menjadi focus Kerjasama Indonesia-Korea Selatan adalah kebudayaan karena dapat memperkuat hubungan persahabatan melalui konsep *people to people*. Kemudian pada 28 November 2000 dibuatlah suatu perjanjian kebudayaan melalui *Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of Korea on Cultural Cooperation*. Salah satu mitra strategis Indonesia adalah Korea Selatan. Setelah ditanda tangannya *Joint Declaration on Strategic Partnership* pada tanggal 4 Desember 2006 oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun hubungan kerjasama bilateral mengalami peningkatan yang sangat tajam dalam decade terakhir ini (kbriseoul, 2014).

*The First Cultural Committee Meeting* yang diadakan di Jogjakarta pada tanggal 14-15 Mei 2008 merupakan tindak lanjut dari Kerjasama kebudayaan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Pada pertemuan itu di sepakati film sebagai bagian dari bentuk pertukaran kebudayaan antar kedua negara selain seni tari tradisional, kerajinan music dan pariwisata. Berbagai program pertukaran antar lembaga seni dan budaya kedua negara ada di ranah sosial budaya. Organisasi tari dan kebudayaan memanfaatkan kesempatan ini

untuk menunjukkan kemampuannya dan mempromosikan budayanya di negeri ginseng tersebut karena Korea Selatan aktif menyelenggarakan berbagai ajang promosi budaya internasional di kota-kotanya. Promosi budaya yang dilakukan oleh kelompok seni tari dan budayawan Indonesia di Korea Selatan antara lain *Korea Travel Fair, Hi Seoul, Busan Travel Fair, Busan Film Festival* dan lainnya (kbriseoul, 2014).

Pusat kebudayaan Korsel atau biasa disebut KCCI (*Korean Culture Centre Indonesia*) didirikan pada tahun 2011. Korea Selatan sudah mendirikan pusat kebudayaan di 28 negara selain Indonesia. Tujuan didirikannya adalah untuk memperluas dan memperkenalkan Hallyu di Indonesia (Burhani, 2011). Dalam bidang film, Korea Selatan melakukan beberapa program yang bertujuan untuk mempromosikan budaya di Indonesia diantaranya *Korea-Indonesia Film Festival, Indonesia-Korea Cinema Global Networking*, dan *Korean Academi of Film Arts*. Salah satu yang rutin dilakukan setiap tahun adalah *Korea-Indonesia Film Festival* (KIFF). (Afriantari & Putri, 2017).

Dalam festival film yang diinisiasi oleh Korea Selatan ini diputar berbagai film produksi sineas film Korea Selatan yang juga menayangkan beberapa film Indonesia. Pelaksanaan festival film Korea Selatan telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan nama *Korean Film Festival* yang kemudian mengalami perubahan pada 2013 dengan menambahkan penayangan film Indonesia sehingga menjadi *Korea-Indonesia Film Festival* (KIFF) (Primadhyta S. , 2015).

Pada tahun yang sama (2013) juga dikarenakan penandatanganan MOU kerjasama tersebut selain perubahan nama dan penambahan tayangan film

Indonesia pada festival, film Indonesia bukan hanya ditayangkan di festival film yang dilaksanakan di Indonesia namun juga festival film yang dilaksanakan di Korea Selatan. Sejak pelaksanaannya, festival film ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat khususnya pecinta kebudayaan Korea Selatan yang awalnya hanya dilaksanakan di Jakarta, di tahun 2013 mulai dilaksanakan juga diberbagai kota seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Balikpapan. Film festival yang awalnya hanya dilakukan oleh Korea Selatan dengan hanya menayangkan film buatan Korea Selatan kemudian Indonesia melakukan kerjasama *Korea-Indonesia Film Festival* (KIFF).

Dalam melakukan Kerjasama KIFF ini, Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam melakukan Kerjasama KIFF ini antara lain terciptanya pertukaran misi kebudayaan sehingga lebih saling mengenal kebudayaan negara masing-masing, mengenal teknologi perfilman, meningkatkan industri kreatif untuk lebih meningkatkan perfilman di Indonesia.

Kerjasama di bidang film merupakan upaya pemerintah untuk mendorong adanya kolaborasi lanjutan dan pengembangan industri film Indonesia. Dengan adanya festival film baik di Indonesia maupun Korea Selatan adalah usaha untuk memperkenalkan film-film terbaik kedua negara dan juga untuk dapat mengetahui jenis perfilman seperti apa yang laku dipasar kedua negara (Sagita, 2019). Selain itu, BEKRAF memberikan jalan bagi film-film Indonesia untuk berpartisipasi dalam festival film yang dilaksanakan di

Korea Selatan juga keikutsertaan film Indonesia diharapkan dapat meningkatkan popularitas film Indonesia. Dalam kesempatan yang sama BEKRAF juga menginginkan industri film lokal dapat bersaing di pasar Internasional sebagai salah satu bagian dari industry kreatif. (Khusuma, 2016).

RI dan ROK menjalin Kerjasama dalam bidang industri kreatif sebagai upaya pengembangan industri kreatif Indonesia. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MOU)* pada 2013 yang kemudian diperpanjang pada 16 Mei 2016 antara Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan. Penandatanganan MOU kerjasama tersebut mencakup semua sektor atau bidang dalam industri kreatif. Hingga tahun 2017, implementasi kerjasama telah dilakukan dalam beberapa bidang industri kreatif. Beberapa diantaranya adalah industri mode, konten animasi, konten penyiaran tv dan kuliner serta film (Afriantari & Putri, 2017).

Terdapat 3 sumber utama dalam soft power menurut (Nye, 2004) yaitu kebudayaan tradisional ataupun kebudayaan populer, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri yang bermoral. Dalam film mengandung soft power yang dapat digunakan sebagai alat untuk diplomasi karena memiliki kreatifitas dan nilai seni, sehingga film dipercayai mampu mempresentasikan dan memvisualisasikan karakter dan indentitas suatu masyarakat serta negara. Maka dari itu, festival film merupakan sarana untuk melakukan diplomasi public atau lebih tepatnya dalam bentuk diplomasi budaya terhadap Masyarakat suatu negara.

Peneliti mengambil topik ini karena adanya suatu ketertarikan terhadap pesatnya perkembangan negara Korea Selatan karena Korean Wave atau Hallyu di lingkungan internasional khususnya di Indonesia. Film yang dijadikan sebagai soft power oleh Korea Selatan untuk berdiplomasi dan menjalankan hubungan bilateral dengan negara lain merupakan pemacu keberhasilan ini. KIFF merupakan salah satu bentuk Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan apakah dapat memberikan dampak yang positif bagi negara Indonesia atau hanya akan memberikan keuntungan bagi Korea Selatan saja. Ada 3 motif utama yang menjadi dasar dalam proses hubungan bilateral, yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hubungan bilateral merupakan hubungan antara dua negara dengan tujuan untuk menguntungkan dua belah pihak (Perwita, 2005).

Untuk memelihara kepentingan nasional dan memperkuat hubungan bilateral, Indonesia dengan Korea Selatan melakukan Kerjasama KIFF dengan tujuan untuk mempromosikan pariwisata budaya demi kepentingan masing-masing negara. Persepsi masyarakat suatu negara terhadap negara terkait dapat dipengaruhi oleh film, sehingga diyakini bahwa film mampu menjadi sarana untuk membagikan informasi terkait budaya suatu bangsa. Menurut (Mujiono, 2019) secara umum terdapat 9 sektor yang termasuk dalam kepentingan nasional, diantaranya politik, ekonomi, perdagangan nasional, bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, control terhadap senjata, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pendidikan.

Dalam kasus Indonesia, tujuan nasional yang lebih luas telah dinyatakan dalam bagian keempat UUD 1945, yang menguraikan komitmen

untuk menjaga seluruh penduduk Indonesia dan keutuhan wilayah negara, memajukan kesejahteraan umum, mendorong pembangunan nasional, dan berkontribusi pada pembangunan. terbentuknya tatanan global berdasarkan prinsip kebebasan, ketentraman jangka panjang, dan sistem sosial yang berkeadilan. Arah kebijakan suatu negara, khususnya di bidang luar negeri, berdampak pada kepentingan nasional yang masih menjadi konsep subjektif. (Marlinda, 2018).

Dalam hal kerjasama bilateral Indonesia-Korea Selatan, teori mengenai diplomasi budaya digunakan untuk menganalisis kepentingan Indonesia dalam kerjasama Korea-Indonesia Film Festival (KIFF). Kepentingan nasional Indonesia dalam melakukan kerjasama ini yaitu untuk memperkenalkan kehidupan sosial, kebudayaan dan warga korea selatan serta mempelajari kebudayaan masyarakat Indonesia melalui film, berkembangnya penggunaan teknologi perfilman Indonesia dan tumbuhnya industry kreatif. Harapan terhadap kegiatan ini adalah semakin banyak warga Korea dan Indonesia yang saling memahami kebudayaan masing-masing negara dan saling memberikan dukungan terhadap film-film yang akan ditayangkan. Penelitian ini juga dibatasi mulai dari tahun 2013-2019, karena pada tahun 2020 pemerintah lebih terfokuskan untuk mengatasi pandemi COVID 19. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti topik dengan judul “*Dampak Kerjasama Korea-Indonesian Film Festival (KIFF) Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia Tahun 2013-2019*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu **bagaimana dampak kerjasama *Korea-Indonesia Film Festival* terhadap kepentingan nasional Indonesia pada tahun 2013-2019?**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan teori kerjasama internasional, kepentingan nasional dan konsep diplomasi budaya yang dijadikan dasar berfikir dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

### **1. Konsep Kerjasama Internasional**

Kerjasama adalah suatu interaksi antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan sama tanpa adanya paksaan. Kerjasama dapat timbul dikarenakan pihak yang terlibat memiliki kebutuhan untuk dipenuhi atau juga sebagai komitmen terhadap kesejahteraan bersama. Kerjasama internasional adalah interaksi hubungan beberapa pihak dengan tujuan serta motif yang sama dengan didukung kondisi internasional yang saling membutuhkan dan didasari oleh kepentingan nasional.

Pengertian kerjasama internasional menurut Koesnadi Kertasasmita dalam bukunya Organisasi Internasional adalah:

Kerjasama Internasional terjadi karena *nation understanding* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama ini didasari oleh kepentingan-kepentingan bersama diantara negar-negara, namun kepentingan tersebut tidak identik” (Kartasasmita, 1983).

Menurut (Holsti, 1988), Berikut pengertian kerja sama internasional:

- a. Gagasan bahwa beberapa kepentingan, nilai, atau tujuan bertepatan dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan atau keberhasilan bagi semua pihak secara bersamaan.
- b. Perspektif atau aspirasi suatu negara bahwa pilihan yang diambil oleh negara lain akan memajukan kepentingan dan cita-citanya sendiri.
- c. Perjanjian atau permasalahan spesifik antara dua negara atau lebih yang dimaksudkan untuk memanfaatkan kepentingan bersama atau menyelesaikan permasalahan yang tegang.
- d. Norma-norma yang telah ditetapkan, baik formal maupun informal, yang mengarahkan transaksi yang akan datang dimaksudkan untuk menegakkan kesepakatan.
- e. Kerjasama internasional untuk menegakkan dan melaksanakan perjanjian yang telah ditetapkan. (Holsti, 1988).

Dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* (Holsti, 1988) berpendapat kerjasama internasional dilakukan oleh negara dengan tujuan mencapai kepentingan nasional yang tidak bisa dicapai hanya didalam negeri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong terbentuknya kerjasama internasional (Holsti, 1988). Ada beberapa bentuk kerjasama internasional diantaranya kerjasama bilateral dan multilateral. Kerjasama bilateral dilakukan oleh dua negara dikarenakan berbagai kepentingan contohnya kepentingan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan keamanan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Kerjasama Internasional untuk menjelaskan terbentuknya kerjasama KIFF, dampaknya bagi kepentingan nasional Indonesia yang berhasil tercipta karena adanya KIFF.

## **2. Konsep Kepentingan Nasional**

Setiap negara mempunyai tujuan tertentu yang disebut dengan Kepentingan Nasional. Karena pentingnya fungsi negara sebagai kontributor utama dalam membentuk kerangka interaksi internasional, gagasan ini menjadi landasan fundamental dalam bidang hubungan internasional.

Sementara itu, (Holsti, 1988) Hal ini dikemukakan dalam konteks Politik Internasional: Analisis Kerangka Kerja bahwa tujuan kebijakan luar negeri suatu negara harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan unik atau kepentingan nasional negara tersebut. Holsti melanjutkan dengan mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi tiga kelompok terpisah. nilai-nilai, khususnya kedaulatan, yang mewakili karakteristik paling penting suatu negara dan sangat penting bagi keberadaannya. Kedua, terdapat tujuan-tujuan antara yang berfokus pada kebutuhan untuk memperbaiki atau memajukan situasi ekonomi negara tersebut. Yang terakhir, terdapat tujuan-tujuan jangka panjang. tujuan jangka panjang yang bersifat idealis, seperti keinginan untuk membangun perdamaian dan keharmonisan dunia.

O'Callaghan dan Roach dalam (Putra A. &., 2023) Terdapat bukti bahwa kebijakan tertentu ditentukan dan didukung oleh kepentingan

nasional. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kepentingan tersendiri yang diungkapkan melalui kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri berfungsi sebagai alat untuk memajukan kepentingan nasional suatu negara.

Suatu negara selalu bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya, apapun jenis pemerintahan yang dimilikinya (Nye, 2004). Kepentingan nasional ini secara signifikan mempengaruhi cara suatu negara memandang dunia. Oleh karena itu, kepentingan nasional suatu negara dipandang sebagai pedoman mendasar bagi kebijakan luar negerinya, yang secara alami mengarahkan pilihannya mengenai kapan dan di mana harus terlibat dalam interaksi internasional.

“Kepentingan vital dan kepentingan sekunder adalah dua cara berbeda dalam memandang kepentingan nasional. Elemen penting suatu negara, seperti kedaulatan dan penguasaan wilayah, disebut sebagai kepentingan vital. Kekuatan militer atau bentuk “hard power” lainnya dapat digunakan dalam kepentingan vital. upaya mencapai tujuan-tujuan penting ini. Di sisi lain, kepentingan-kepentingan sekunder dicapai secara diplomatis melalui program-program pertukaran budaya dan strategi-strategi soft power lainnya. Upaya untuk mencapai tujuan-tujuan nasional ini bertumpu pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya sekedar kesejahteraan rakyat. kepentingan mereka yang berkuasa.

Untuk memotivasi negara agar berupaya mencapai tujuan nasionalnya, Nuechterlein mengusulkan empat kepentingan penting. Yang pertama dan terpenting, kepentingan pertahanan berarti melindungi negara

dan warganya dari ancaman fisik yang ditimbulkan oleh negara lain. Kedua, memajukan perekonomian bangsa melalui hubungan diplomatik dan kerja sama internasional merupakan bagian dari memiliki kepentingan ekonomi. Kepentingan ketiga berkaitan dengan penegakan tatanan global, yang menjamin keamanan negara-bangsa dan perilaku damai warga negara di luar perbatasan negara-negara tersebut. Yang terakhir, kepentingan ideologis berpusat pada pembelaan ideologi suatu negara terhadap ancaman yang dibawa oleh negara lain (Williams 2012).

Memperhatikan berbagai nilai yang muncul untuk membentuk karakter khas suatu bangsa, sudah sewajarnya merupakan bagian dari kepentingan nasional suatu bangsa. Aspek kebudayaan setiap negara tentunya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Jalur diplomasi digunakan dalam menjalankan politik luar negeri suatu negara.

Alinea keempat UUD 1945 yang menekankan pada kelestarian seluruh penduduk dan wilayah Indonesia, serta peningkatan kesejahteraan umum, pendidikan nasional, dan partisipasi aktif dalam pembentukan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, menguraikan kepentingan nasional Indonesia secara menyeluruh. Kepentingan nasional Indonesia pada dasarnya terkandung dalam tujuan “memajukan kesejahteraan umum dan pembinaan intelektualitas nasional”. Tugas pemerintah adalah melaksanakan prioritas-prioritas tersebut. Mengatasi kesejahteraan masyarakat, yang mencakup kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, dan pakaian, merupakan bagian penting dari agenda nasional Indonesia. Penerapan kebijakan yang

menyasar bidang-bidang penting, seperti 1) menjaga ketahanan pangan, energi, dan sumber daya, serta 2) mendorong terobosan teknis dan informasi, diperlukan untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia yang penting.

“Mengamankan pangan, energi, dan sumber daya sangatlah penting karena keduanya berfungsi sebagai sumber daya dan metode untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan rakyatnya. Selain itu, penting untuk memberikan perhatian yang cermat terhadap peningkatan inovasi teknologi dan informasi saat ini. Dedikasinya dalam membina perkembangan intelektual generasi muda ditunjukkan dalam kebijakan pemerintah yang mensubsidi penelitian teknologi dan informasi serta pendidikan gratis. Upaya pemerintah untuk memajukan kepentingan nasional penting Indonesia terkait langsung dengan inisiatif ini.

Jelas bahwa kedua negara ingin mewujudkan tujuan nasional masing-masing berkat upaya kerja sama yang ditunjukkan dalam kolaborasi Indonesia-Korea Selatan di bawah KIFF. Soft diplomacy yang mengedepankan nilai dan ciri budaya dimanfaatkan Korea Selatan untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan Indonesia. diperingkat demi memajukan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kajian penulis terhadap gagasan kepentingan nasional Indonesia dalam penelitian ini berpusat pada upaya mencapai tujuan nasional tambahan dan pemanfaatan budaya sebagai alat kerja sama.

### **3. Konsep Diplomasi Budaya**

Kajian tersebut menggunakan kerangka diplomasi budaya untuk masuk ke dalam eksplorasi di dalam penelitian ini. Diplomasi budaya dapat

digunakan untuk mencapai tujuan promosi wisata budaya Indonesia sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya. Menurut Warsito yang merujuk pada K.J. Holsti (Warsito & Kartikasari, 2007), Yang dimaksud dengan istilah diplomasi adalah tindakan suatu negara yang mengadvokasi kepentingan nasionalnya dalam komunitas internasional. Perundingan hanyalah salah satu aspek diplomasi, tetapi juga mencakup kegiatan lain yang melibatkan hubungan internasional (Warsito & Kartikasari, 2007).

Di sisi lain, EB. Tylor mendefinisikan budaya (Poerwanto, 2010) Menurut E.B. Tylor, budaya adalah 'entitas komprehensif yang mencakup informasi, kepercayaan, seni, hukum, moral, konvensi, dan serangkaian keterampilan dan perilaku yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Selain itu, budaya mencerminkan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan memberikan kerangka bagi peradaban untuk menavigasi norma-norma sosial dalam konteks komunitas, bangsa, dan negara yang lebih luas (Sedarmayanti, 2014).

Sedangkan (Nye, 2004) mengklaim bahwa 'budaya adalah sumber kekuatan lunak. Ungkapan "soft power" yang dipopulerkan Nye mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi entitas lain tanpa menggunakan kekuatan koersif, dengan menawarkan insentif dalam bentuk keuntungan finansial dibandingkan menggunakan kekuatan militer sebagai alat pencegah. tidak berwujud, dan hal ini mencakup daya tarik ideologi dan budaya serta keberadaan institusi dan aturan di tingkat internasional. (Ashari, 2015). Menurut teori soft power Joseph Nye, budaya dapat memberikan reputasi yang baik pada suatu negara.

Jadi, seperti yang dikatakan Holsti, “diplomasi budaya dapat dipahami sebagai upaya suatu negara untuk memajukan kepentingan nasionalnya melalui aspek budaya, mulai dari bidang individual seperti pendidikan, olahraga, ilmu pengetahuan, dan seni hingga bidang yang lebih luas yang selaras dengan atribut-atribut yang berbeda namun tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya. terputus dari unsur-unsur pemaksaan seperti embargo, kutukan, dan kekuatan militer.” (Warsito & Kartikasari, 2007). Namun Nye menawarkan sudut pandang yang dibingkai ulang mengenai gagasan diplomasi soft power, mengatasi kelemahan-kelemahan sebelumnya. Menurut definisi Nye, "soft power diplomacy" adalah kemampuan untuk mempengaruhi keputusan negara lain melalui upaya kolaboratif dalam menetapkan agenda, melakukan tindakan yang menguntungkan. kegiatan, dan menyampaikan undangan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Melalui sarana dan instrumen kebijakan luar negeri yang diadopsi suatu negara, gaya diplomasi ini dapat dioperasionalkan (Nye, 2004).

“Diplomasi kebudayaan, dipahami sebagai jembatan Internasional dan interaksi, jaringan dan power melalui budaya yang dimana melintai batas-batas nasional dan budaya. Dengan perkembangan teknologi, *soft power* membaaur dalam kebudayaan nasional termasuk di dalamnya pendidikan (pengetahuan), kepercayaan, seni, moral dan segala macam kemampuan dan kebiasaan yang tercipta oleh masyarakat” (Rachmawati, 2019).

Kelompok pemerintah dan non-pemerintah, serta individu, dapat terlibat dalam diplomasi budaya kolektif atau individu. Ada tiga cara

diplomasi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan hal ini. Pertama, diplomasi jalur satu adalah strategi diplomasi formal yang hanya melibatkan organisasi pemerintah. Kedua, diplomasi jalur dua mencakup upaya informal organisasi non-pemerintah dalam membangun kepercayaan atau menyelesaikan perselisihan. Ini mencakup individu dan organisasi. Hal semacam ini sering terjadi dalam bentuk diskusi antara akademisi, pemerintah daerah, dan aktivis sosial. Sekelompok individu atau aktor non-pemerintah terlibat dalam diplomasi jalur tiga, yang sering dikenal sebagai “diplomasi antar masyarakat,” dengan tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat. (Ashari, 2015).

Karena unsur-unsurnya yang luas, yang hadir dalam semua budaya global, budaya dipandang berpengaruh dalam bidang diplomasi media. Selain itu, budaya dipandang menyatukan orang-orang dan menyatukan orang-orang melampaui batas negara. Diplomasi budaya bertindak sebagai wujud dari cita-cita nasional dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang di masyarakat lain dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh diplomasi tradisional. Selain itu, diplomasi budaya menawarkan landasan positif untuk kerja sama. Diplomasi budaya dapat meningkatkan perspektif dan citra suatu bangsa baik secara internal maupun internasional dibandingkan dengan sebelumnya. sebelumnya, bertindak sebagai alat transformatif.

Diplomasi kebudayaan sering dilakukan untuk meratakan jalan bagi pembukaan dan peningkatan hubungan di antara dua negara atau lebih. Dalam hal ini, Indonesia dan Korea Selatan melakukan pendekatan diplomasi kebudayaan kedua negaranya melalui perjanjian kerjasama dalam *Joint*

*Declaration on Strategic Partnership* di bidang sosial budaya, hal tersebut dilaksanakan guna membantu ruang gerak kedua negara untuk menunjukkan identitas diri masing-masing masyarakat negaranya yang menitikberatkan kebudayaan dan kultur sosial masyarakat Indonesia dan Korea Selatan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- a. Menjelaskan dampak kerjasama *Korea-Indonesia Film Festival* selama periode 2013-2019 terhadap kepentingan nasional Indonesia.
- b. Menjelaskan KIFF sebagai instrumen diplomasi budaya Indonesia ke Korea Selatan.

#### **E. Hipotesis**

Berdasarkan pada kerangka teori yang telah dijelaskan di atas, penulis menarik hipotesa yang mengatakan bahwa dalam melakukan kerjasama Korea-Indonesia Film Festival dengan Korea Selatan dampak terhadap kepentingan nasional Indonesia adalah terciptanya pertukaran kebudayaan sehingga lebih saling mengenal kebudayaan negara masing-masing, mengenal teknologi perfilman, meningkatkan industri kreatif untuk lebih meningkatkan perfilman di Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif agar dapat menggambarkan dampak dari kerjasama *Korea-Indonesia Film Festival* dengan Korea Selatan terhadap kepentingan nasional negara Indonesia. Untuk dapat menjelaskan tujuan dan dampaknya, maka berbagai informasi dan

data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka berupa buku, jurnal, berita, dan sumber informasi lainnya baik elektronik ataupun cetak yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan. Berbagai data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat menjelaskan tujuan Indonesia melakukan kerjasama *Korea-Indonesia Film Festival* dengan Korea Selatan pada periode tahun 2013-2019.

Dalam penelitian ini juga dilakukan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara terhadap informan ahli ataupun dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah tokoh akademisi yang dianggap mengetahui tentang perfilman Indonesia di Korea Selatan. Objek analisis dalam penelitian ini adalah kerjasama *Korea-Indonesia Film Festival* itu sendiri dan juga dampaknya yaitu berbagai kerjasama yang terbentuk karena KIFF.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini memiliki jangkauan agar menjaga pembahasan tidak meluas dan melebar, penelitian dan pembahasan akan fokus pada dampak kerjasama *Korea-Indonesia Film Festival* dengan menganalisis tujuan dan dampak bagi kepentingan nasional negara Indonesia dalam bidang sosial dan budaya adalah terciptanya pertukaran misi kebudayaan, dalam bidang pendidikan yaitu mengenal teknologi perfilman dan dalam bidang industri kreatif sebagai sub sektor bidang ekonomi adalah meningkatkan industri kreatif untuk lebih meningkatkan perfilman di Indonesia. Penelitian juga dibatasi pada periode tahun 2013-2019 karena sebelumnya festival film tersebut hanya fokus pada Korea Selatan dan baru berubah pada 2013 dengan keterlibatan Indonesia,

selain itu pada tahun 2020 pemerintah Indonesia sedang berfokus dalam menyelesaikan permasalahan pandemic Covid 19.

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan Skripsi**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

### **Bab II. Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Korea Selatan**

Bab ini membahas kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam berbagai bidang, kerjasama dalam bidang perfilman khususnya *Korea-Indonesia Film Festival* dan dampak KIFF terhadap kepentingan nasional Indonesia.

### **Bab III: Kesimpulan**

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.